

## **Penerbitan dokumen permintaan saran dalam pembahasan hak pilih untuk para pidana**

Pemerintah menerbitkan hari ini (09 Februari) dokumen permintaan saran untuk para pidana dalam hak pilih mereka dan juga mengumpulkan pendapat umum dari masyarakat mengenai kebijaksanaan dalam memberikan pilihan untuk merenggangkan adanya pelarangan para pidana dalam hak memilih juga pengaturan yang praktis untuk para pidana termasuk seseorang yang masih ditahan tetapi belum mendapatkan hukuman untuk bisa ikut dalam hak pilih mereka. Masa pembahasan ini akan berakhir pada tanggal 23 Maret 2009.

Pengadilan tinggi memberikan pertimbangan dalam tiga kasus pengadilan yang ditinjau pada tanggal 08 Desember 2008. Pengadilan memandang dengan adanya pelarangan hak para pidana untuk mendaftarkan sebagai pemilih dan mempunyai hak memilih dibawah Peraturan Dewan pembuat undang-undang bukan undang-undang dasar. Pengadilan juga menilai persiapan ini memperbolehkan seseorang yang masih ditahan untuk memilih di hari pemilihan umum walaupun dalam tahanan. Melihat keputusan tersebut, perlunya administrasi pemerintahan untuk meninjau kembali kebijaksanaan dalam pilihan yang merenggangkan pelarangan dan memberi pengaturan yang mudah kepada para pidana dan seseorang yang ditahan walaupun belum dijatuhkan hukuman untuk menjalankan hak pilih mereka.

Pemerintah juga mengusulkan dalam dokumen permintaan saran tersebut untuk menghapuskan pembatalan pendaftaran para pidana untuk hak pilih mereka.

Sehubungan dengan kerenggangan pelarangan hak pilih para pidana, pemerintah mengajukan kebijaksanaan pilihan sebagai berikut:

a) Pilihan pertama adalah menghapuskan ketentuan pembatalan sesuai syarat yang sudah ada dalam pembatalan hak pilih seseorang, sebagai berikut:

1. Kepada mereka yang mendapat hukuman mati atau penjara atau belum menerima hukuman (atau pengganti hukuman) atau menerima pengampunan, atau
2. Kepada mereka yang menerima hukuman penjara.

Mengijinkan para pidana untuk mendapatkan hak pilihnya sehingga membantu mereka untuk lebih berpikiran sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakatnya. Bagaimanapun, ada juga pandangan mengenai kejahatan yang serius akan dibatalkan dari hak pilihnya untuk menghindarkan bertambahnya kejahatan dan meningkatkan tanggung jawab warga sipil dan menghormati peraturan hukum.

b) Pilihan kedua adalah pembatalan para pidana dari hak pilihnya jika mereka menerima hukuman dalam masa waktu yang lama (misalkan 10 tahun atau lebih). Ini akan mengimbangi antara menjaga keutuhan hukum dan menetapkan hak pilih mereka sehingga mengurangi tindak kejahatan. Masa hukuman dapat digunakan sebagai ukuran yang membedakan antara kejahatan yang serius dan yang tidak serius. Bagaimanapun, ada beberapa pendapat beberapa pelanggaran hukum tidaklah mudah ditentukan dengan melihat ukuran dari waktu lamanya hukuman penjara.

c) Pilihan ketiga adalah pembatalan para pidana dari hak pilihnya jika mereka menerima hukuman dalam jangka waktu yang lama (misalkan 10 tahun atau lebih) sementara memungkinkan mereka untuk memulai hak pilih mereka pada akhir masa beberapa tahun mereka dipenjara (misalkan, 5 tahun terakhir masa hukuman). Untuk memungkinkan para pidana memilih pada masa-masa terakhir hukuman dapat meningkatkan pemikiran mereka sebagai warga sipil dan memudahkan mereka membaur dan memperbaiki hubungan didalam masyarakat. Bagaimanapun, pemikiran dari pilihan ini juga sesuai masa hukuman, dan akan menimbulkan rasa kekhawatiran yang sama karena akan mengakibatkan juga pembatalan hak pilih mereka.

Pemerintah juga mengajukan usulan pengaturan yang mudah untuk para pidana dan seseorang yang masih ditahan tetapi belum dijatuhkan hukuman untuk menjalankan hak pilihnya di dalam dokumen permintaan saran tersebut. Meliputi, misalkan alamat terdaftar pidana yang terpilih sebagai pemilih, meminta dukungan untuk memilih oleh para calon dan pemungutan suara dan pengaturan hitungan untuk para pidana.

Dokumen permintaan saran ini bisa didapatkan dari kantor distrik setempat atau dari situs Biro perundang-undangan dan urusan daratan Cina di [www.cmab.gov.hk](http://www.cmab.gov.hk).

Masyarakat juga dapat memberikan pendapat umum mereka dengan mengirimkan melalui pos (kepada Team 2, Constitutional and Mainland Affairs Bureau, room 356, East Wing, Central Government Offices, Lower Albert Road, Hong Kong), fax (ke 2840 1976) atau email (ke [pvr\\_consultation@cmab.gov.hk](mailto:pvr_consultation@cmab.gov.hk)) pada atau sebelum 23 Maret 2009.

Senin, 9 Februari 2009.